

INTISARI

Opini WTP yang diberikan BPK merupakan cerminan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik. Keterlibatan aktif dari seluruh perangkat daerah sangat diperlukan untuk mencapai opini WTP tersebut. Karena dengan dicapainya opini WTP menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya secara optimal mewujudkan prinsip *good governance*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepala daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, dan aparat pengawasan intern daerah dalam mempertahankan opini WTP secara konsisten pada laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Pemda DIY. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara dan analisis dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rangka mencapai opini WTP atas LKPD Pemda DIY secara konsisten maka kepala daerah berperan dalam menyusun serta mendistribusikan kebijakan politis ke dalam aktifitas SKPD serta melakukan pembinaan secara periodik terhadap seluruh jajaran SKPD. Selain peran kepala daerah, dalam rangka mencapai opini WTP secara konsisten, pejabat pengelola keuangan daerah berperan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan laporan keuangan daerah, koordinasi penyusunan laporan realisasi, merumuskan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah, serta menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Selanjutnya, dalam rangka membantu Pemda DIY mempertahankan opini WTP secara konsisten maka aparat pengawasan intern daerah berperan dalam melakukan reviu laporan keuangan pemerintah daerah dan dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran daerah, evaluasi sistem pengendalian internal setiap SKPD, melakukan pemeriksaan secara regular dan tematik, melakukan koordinasi tindak lanjut hasil temuan BPK dan melakukan pemeriksaan *cash opname* dan *stock opname* pada akhir periode.

Kata kunci: Peran kepala daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, aparat pengawasan intern daerah, opini wajar tanpa pengecualian.

ABSTRACT

Unqualified opinion is a reflection of transparency and accountability of good governance. The active involvement of all regional tools is necessary to achieve the opinion. Because this achievement indicates that the government has optimally tried to reach the principle of good governance. This study aims to analyze the role of governor, local finance manager, and local internal auditor to preserve the opinion consistency in the local government financial statements (LKPD) of DIY Local Government. This study utilized descriptive qualitative approach and used interviews and document analysis for data collection.

The result of the study shows that in order to achieve the opinion consistency of LKPD of DIY Government, the governor plays a role in preparing and distributing the political policy into SKPD activities and conducting periodical guidance to all SKPD units. In addition to the role of regional heads to achieve the WTP opinion consistency, local finance manager play a role in preparing the formulation of technical policy preparation of local financial statements, coordinating the preparation of realization reports, formulating accounting policies and local government accounting system, and preparing and presenting government financial statements area (LKPD). Furthermore, in order to help the DIY Government to maintain the opinion consistency of the LKPDs, the internal control apparatus will play a role in reviewing local government financial reports and planning documents on local activities and budgets, evaluating the internal control system of each SKPD, conducting regular and thematic checks, continued the findings of BPK and conducted checks of *cash opname* and *stock opname* at the end of the period.

Keywords: Role of regional head, regional finance manager, local internal control apparatus, unqualified opinion